

**IMPLEMENTASI PROGRAM BAPAK  
BUNDA ASUH ANAK STUNTING DALAM PENANGANAN STUNTING DI  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

Billy Frederick Wenno

NPP. 30.1432

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [frederickwenno@gmail.com](mailto:frederickwenno@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Sarwani, M.Ag

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** *The author highlights the problems that occur during the implementation of the stunting program in handling stunting in Yapen Islands Regency, Papua Province where there are still obstacles in overcoming the problem of stunting and community welfare. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the implementation of the stunting program, with a focus on the factors that support and hinder and the efforts made by the government. **Methods:** This study used a qualitative approach. Data collection techniques used interview techniques, observation and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results:** The findings of this study indicate that the implementation of the stunting program in handling stunting in Yapen Islands Regency, Papua Province is still not going well. The results show that stunting in Yapen Islands Regency faces significant challenges related to limited access, consistency of rules, insufficient personnel, and limited resources, but collaborative efforts and adaptation to local needs are key to overcoming stunting problems and improving the welfare of children in the region. **Conclusion:** The implementation of the foster mother program for stunting children in handling stunting in Yapen Islands Regency, Papua Province has not gone well because Yapen faces significant challenges related to limited access, The obstacles in the implementation of the Bapak Bunda Anak Asuh Stunting program in Yapen Islands Regency are that there are still community groups who have not received information about the Bapak Bunda Anak Asuh Stunting program, indicating the need for increased socialization to increase awareness of the importance of the program in improving the health and quality of life of children and families in Yapen Islands Regency. In order to improve program implementation, it is suggested that to increase the effectiveness of the Bapak Bunda Anak Asuh Stunting program in the Yapen Islands Regency, it is necessary to improve socialization strategies through various media, strengthen cross-sectoral cooperation, and innovations in approaches to reach remote areas, which are important steps in increasing public awareness and participation and the success of the program.*

**Keywords:** *program implementation, digitalization, distribution of village financial assistance*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis menyoroti masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan implementasi program bapak bunda asuh anak stunting dalam penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, di mana masih terdapat kendala dalam mengatasi masalah stunting dan kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan program bapak bunda asuh anak stunting, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil /Temuan:** Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bapak bunda asuh anak stunting dalam penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua masih belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan akses, konsistensi aturan, ketidakcukupan personil, dan sumber daya yang terbatas, namun upaya kolaboratif dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program bapak bunda asuh anak stunting dalam penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya tantangan signifikan terkait keterbatasan akses, konsistensi aturan, ketidakcukupan personil, dan sumber daya yang terbatas, namun upaya kolaboratif dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. hambatan dalam implementasi program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai program bapak bunda anak asuh stunting, menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya program tersebut dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak serta keluarga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Guna meningkatkan pelaksanaan program maka disarankan untuk meningkatkan efektivitas program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, diperlukan peningkatan strategi sosialisasi melalui media yang beragam, penguatan kerjasama lintas sektor, dan inovasi dalam pendekatan untuk mencapai wilayah terpencil, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta kesuksesan program tersebut.

**Kata kunci: pelaksanaan program, digitalisasi, penyaluran bantuan keuangan desa**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan lebih pendek dari rata-rata usianya karena kurangnya nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan. Stunting dapat menyebabkan dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak, serta berpengaruh negatif pada produktivitas dan kesejahteraan di masa depan. (Eko Putro sandjojo,2017 )

Berdasarkan data WHO, prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara adalah Timor Leste dengan rata-rata 50,2%, diikuti India sebesar 38,4%. Indonesia berada di urutan ketiga dengan prevalensi stunting sebesar 36,4%. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status



Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi juga rendahnya kemampuan belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit kronis.

Stunting terjadi karena malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak, yang membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak secara permanen. Kemiskinan, kurangnya pengetahuan, praktik pengasuhan yang buruk, dan pemberian makanan yang tidak memadai turut menyebabkan tingginya angka gizi buruk. Kesehatan ibu juga berperan penting, di mana banyak perempuan hamil di usia remaja dan tidak makan dengan benar selama kehamilan, sehingga sering melahirkan bayi dengan berat badan rendah.

Di Indonesia, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, meskipun negara ini telah mengalami kemajuan ekonomi dan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1.**

**Prevelensi Balita Stunting di Indonesia 10 Provinsi Tertinggi**

No	Provinsi	Jumlah Balita Stunting Tahun 2022 Dalam Persen
1.	Nusa Tenggara Timur	35,3
2.	Sulawesi Barat	35
3.	Papua	34,6
4.	Nusa Tenggara Barat	32,7
5.	Aceh	31,2
6.	Papua Barat	30
7.	Sulawesi Tengah	28,2
8.	Kalimantan Barat	27,8
9.	Sulawesi Tenggara	27,7
10.	Sulawesi Selatan	27,2

Sumber : Databoks.co.id

Berdasarkan tabel, 10 provinsi tersebut memiliki prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stunting, termasuk program peningkatan gizi, penyuluhan pentingnya gizi seimbang, peningkatan akses layanan kesehatan dan sanitasi, serta kebijakan mendukung pertumbuhan anak optimal. Pengurangan angka stunting memerlukan kerjasama pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Edukasi terus-menerus tentang gizi seimbang dan peningkatan akses pangan bergizi serta layanan kesehatan adalah langkah penting. Diharapkan angka stunting dapat terus menurun dengan upaya bersama.

Penanganan stunting didasari oleh Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang "Percepatan Penurunan Stunting" yang mengatur strategi nasional, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, laporan, dan pendanaan. Stunting adalah kondisi pertumbuhan anak terhambat karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang dikenali dengan tinggi badan di bawah standar kesehatan. Upaya percepatan melibatkan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia 0-59 bulan.

Program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah upaya eliminasi stunting yang diluncurkan BKKBN sebagai gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa untuk mempercepat penurunan stunting dan menyasar langsung keluarga dengan anak berisiko stunting.

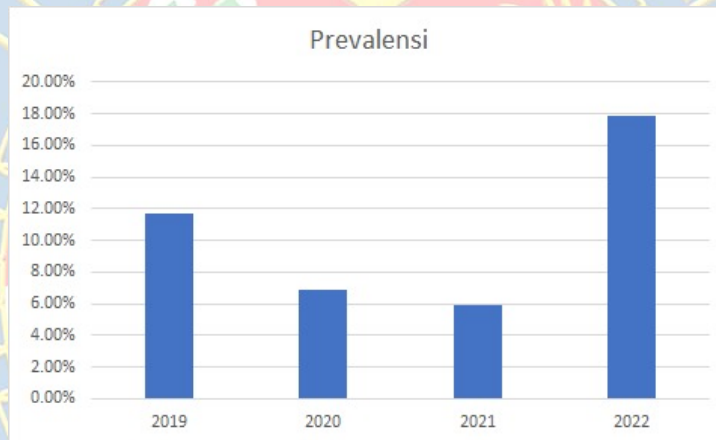
## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Papua, provinsi di bagian timur Indonesia, menghadapi banyak masalah kesehatan dan gizi, termasuk stunting. Angka stunting yang tinggi di provinsi ini disebabkan oleh kurangnya akses gizi yang baik, sanitasi buruk, dan praktik pemberian makan yang tidak memadai. Untuk mengatasi stunting, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama melalui edukasi tentang pentingnya gizi, peningkatan ketersediaan makanan bergizi, perbaikan sanitasi dan air bersih, serta pemahaman tentang pemberian makanan sehat kepada anak-anak.

Prevalensi stunting secara nasional berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2021 adalah 24,4%, sedangkan di Provinsi Papua adalah 29,5%. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Papua meningkat menjadi 34,6%, menunjukkan bahwa stunting masih sangat tinggi. Kabupaten Kepulauan Yapen, salah satu kabupaten di Papua, juga mengalami peningkatan kasus stunting pada tahun 2022, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat.

### Gambar 1

#### Hasil Pengukuran Data Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen



Sumber: dinkesyapen.id (2022)

Berdasarkan data, angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, prevalensi stunting mencapai 11,67%. Angka ini menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 6,9% dan 5,9%. Namun, pada tahun 2022, angka stunting meningkat tajam menjadi 17,9%. Ini menunjukkan tantangan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terdiri dari 12 distrik. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani stunting di wilayah ini. Berikut adalah sebaran data stunting berdasarkan kampung tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Yapen.

**Tabel 2**  
**Data Sebaran Kasus Stunting per Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen**

No	Distrik	Jumlah Balita Stunting	Prevelensi
1.	Yapen Selatan	36	16
2.	Anotaurei	72	21
3.	Yapen Barat	128	16
4.	Angkaisera	42	7
5.	Poom	5	2
6.	Teluk Ampimoi	66	33
7.	Kosiwo	-	25
8.	Raimbawi	-	18
9.	Kepulauan Ambai	-	23
10.	Wonawa	-	16
11.	Yeru	-	21
12.	Windesi	-	16

Sumber: dinkesyapen.id (2023)

Data tersebut menunjukkan kasus stunting di 12 Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan prevalensi di setiap kampung. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengukuhkan program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya menurunkan angka stunting. Program ini tercipta melalui proses pembentukan kebijakan yang akan terus berproses hingga tahap evaluasi guna menurunkan angka stunting dan mensejahterakan masyarakat (Winarno, 2012). Program ini melibatkan seluruh pihak, termasuk stakeholder dan masyarakat, yang memberikan bantuan materi maupun makanan tambahan. Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah domain pemerintah, bukan swasta, dan melibatkan pilihan-pilihan yang harus diambil atau dihindari oleh pemerintah (Dye, 2013) penting untuk menyelamatkan generasi berikutnya dan meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan permasalahan stunting. Penelitian Febiayu Rahmanda, Fitriani Pramita Gurning dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Penanggulangan Stunting Dalam Program Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pagar Jati. Menemukan bahwa Tenaga Gizi yang ada di Puskesmas Pagar Jati memang memenuhi standar yang ada pada Permenkes RI namun perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang disesuaikan dengan beban kerja yang ada (Rahmanda, 2022). Penelitian Sri Hajijah Purbadengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggang Kabupaten Langkat. Menemukan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang penurunan stunting (Purba, 2019). Penelitian Erina Fahzira berjudul Implementasi Kebijakan Penurunan



Stunting di Kabupaten Kampar. Menemukan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal (Fahriza,2021). Penelitian Sari, Rosalia Indah dengan judul implementasi kebijakan penanggulangan dalam penurunan stunting di wilayah kerja puskesmas dath kotou kabupaten murung raya menemukan bahwa Faktor komunikasi terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dath Kotou, Kabupaten Murung Raya, menunjukkan tantangan. Beberapa orang tua enggan membawa anak mereka ke puskesmas untuk dipantau karena menganggap anak mereka baik-baik saja atau mengatribusikan stunting sebagai faktor keturunan. Sementara itu, sumber daya manusia yang tersedia belum cukup untuk mendukung program ini sepenuhnya. Beberapa desa belum memiliki posyandu, dan posyandu yang ada masih kekurangan sarana yang memadai untuk memberikan layanan secara optimal(Sari,2021). Penelitian Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. dengan judul Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang menemukan bahwa implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang(Sahroji et all,2022)

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang belum dilakukan sebelumnya, dengan fokus pada masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah kabupaten Kepulauan Yapen . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus pada penjelasan dan pemahaman. Penelitian kualitatif mengajukan pertanyaan untuk mencari makna, pemahaman, konsep, ciri, gejala, dan simbol, menggunakan berbagai metode untuk mendeskripsikan fenomena alam secara holistik, dengan mengutamakan kualitas. penelitian ini yang menjadi instrumen utama yaitu peneliti sendiri yang berfungsi sebagai memilih informan sebagai sumber data, pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan di akhir penelitian. (Creswell, 2013). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data deskriptif tertulis atau pernyataan lisan dari narasumber, didukung oleh observasi dan dokumentasi. Pengukuran keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh pandangan Thomas R. Dye yang menekankan bahwa efektivitas implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya terkait dengan organisasi pelaksana, pedoman aturan, ketersediaan personil dan sumber daya

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting dalam penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut, dengan tujuan untuk menemukan strategi yang efektif dalam mengimplementasikan program ini. Selain itu, penelitian akan menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting dalam menangani stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus pada penjelasan dan pemahaman (Hermawan,2019). Penelitian kualitatif mengajukan pertanyaan untuk mencari makna, pemahaman, konsep, ciri, gejala, dan simbol, menggunakan

berbagai metode untuk mendeskripsikan fenomena alam secara holistik, dengan mengutamakan kualitas (Yusuf,2014).Penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami sehingga data yang diperoleh bersifat alami, tanpa manipulasi, dan terbuka (Fernandes, 2017). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2019).Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 12 informan yang dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabid Kesehatan Masyarakat, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Staff, masyarakat. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan(Sugiyono,2012) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti sedang menganalisis pelaksanaan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menilai sejauh mana implementasinya sudah optimal. Penilaian ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, yang meliputi efisiensi, efektivitas, keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas dari pelaksanaan program tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah program ini telah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam penanganan stunting di wilayah tersebut (Dye,2017).

#### **3.1. Implementasi Program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Kepulauan Yapen**

Kebijakan bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, dengan hasil yang bervariasi tergantung situasi. Setiap kebijakan memiliki manfaat dan dampak yang berbeda bagi pihak terkait. Pelaksana kebijakan harus memahami tujuan dan kondisi lapangan agar hasil sesuai harapan.Penelitian ini menyelidiki implementasi kebijakan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dinas Kesehatan berperan utama dalam mengatasi stunting dan melaksanakan kebijakan ini. Penelitian mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan untuk memahami penerapan kebijakan, peran, serta tantangan yang dihadapi.

##### **3.1.1 Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan, diperlukan badan atau organisasi yang bertindak sebagai pelaksana. Dinas Kesehatan bertanggung jawab menjalankan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut. Organisasi ini berperan kunci dalam menyelenggarakan dan mengeksekusi kebijakan untuk mencapai tujuan program. Menurut teori yang digunakan dalam penelitian, faktor organisasi pelaksana dinilai berdasarkan tiga indikator: ukuran organisasi, kejelasan fungsi, dan hubungan kerja.

###### **3.1.1.1 Besaran organisasi**

Indikator besaran organisasi menggambarkan peran atau tujuan suatu organisasi atau badan pelaksana. Dalam penelitian ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting, yang memiliki tujuan spesifik



untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data yang diperoleh peneliti, ditemukan bahwa pelaksanaan program ini menghadapi kendala karena keterbatasan akses di beberapa wilayah perkampungan dan kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai.

### **3.1.1.2 Fungsi Kerja**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting, terlihat bahwa Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Tanggung jawab ini mencakup penyusunan strategi, pelaksanaan intervensi kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program sesuai ketentuan peraturan presiden. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah anak stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Januari 2023 adalah 566 anak, dan pada Desember 2023 turun menjadi 164 anak. Berdasarkan perbandingan data dan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa masalah stunting menjadi prioritas Dinas Kesehatan, yang bertanggung jawab untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, termasuk melalui pendataan dan pemeriksaan berkala.

### **3.1.1.3 Hubungan Kerja**

Dalam suatu organisasi, terdapat sejumlah kebijakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana kebijakan, dan tanggung jawab terhadap kebijakan tersebut menjadi fokus bagi pihak organisasi terkait. Tanggung jawab ini mendorong terciptanya hubungan kerja antara organisasi-organisasi yang terlibat, yang kemudian menghasilkan koordinasi dan kerja sama antar organisasi. Dalam penelitian ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan mitra lain dalam melaksanakan kebijakan program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting. Salah satu contoh kerja sama ini adalah pertemuan evaluasi disiplin pegawai yang diadakan pada hari Jumat, 20 Januari 2024, yang melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi Program BAAS yang telah berjalan. Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan secara aktif menjalin kerja sama dengan perangkat daerah lainnya dalam menindaklanjuti penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen.

### **3.1.2. Pedoman atau Aturan**

Dalam menetapkan suatu kebijakan, penting untuk disertai dengan peraturan yang mengatur tentang kebijakan tersebut. Adanya peraturan yang terkait dengan kebijakan akan membantu mempermudah proses implementasi kebijakan tersebut, karena kebijakan yang didukung oleh aturan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan yang terkait dengan kebijakan juga memberikan pedoman bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami batasan, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Pada dimensi pedoman atau aturan ini memiliki 3 indikator yaitu kejelasan arah, konsistensi, dan penerapan



### **3.1.2.1 Kejelasan Arah**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, para pelaku kebijakan perlu memahami dengan jelas arah atau tujuan kebijakan tersebut agar dapat menghindari kesalahan dalam implementasinya. Kurangnya pemahaman mengenai arah kebijakan dapat menyebabkan kebijakan yang diimplementasikan tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Penelitian ini berfokus pada kebijakan terkait Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Peraturan ini diharapkan dapat membimbing pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah sesuai pedoman yang ditetapkan untuk menurunkan angka stunting. Peneliti menyimpulkan bahwa kejelasan arah Program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting adalah memberikan layanan kesehatan yang baik bagi anak stunting dan keluarga mereka. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, diharapkan tujuan program ini dapat tercapai.

### **3.1.2.2 Konsistensi**

Dalam implementasi sebuah kebijakan, konsistensi penerapan sangatlah penting. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan untuk diimplementasikan, tetapi juga untuk dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah agar penerapannya dapat tercapai secara konsisten tanpa mengalami penurunan kualitas. Berdasarkan pengamatan peneliti selama menjalani magang dan melakukan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa ketidakconsistenan dalam penerapan dapat menghambat proses pelaksanaan program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting (BAAS).

### **3.1.2.3. Penerapan**

Dalam penelitian mengenai penerapan program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat standar operasional prosedur yang harus diikuti dalam proses penerapan kebijakan. Namun, pada kenyataannya, standar operasional prosedur ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa standar operasional program BAAS di Kabupaten Kepulauan Yapen belum berjalan dengan baik. Minimnya pelatihan yang memadai untuk personel tentang penerapan SOP dengan benar dapat mengurangi kualitas pelaksanaan program.

### **3.1.3. Ketersediaan Personil**

Faktor lain yang penting adalah ketersediaan personil, yang memiliki dampak signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Jika ketersediaan personil untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tidak sesuai dengan harapan awal, maka proses penerapan kebijakan tersebut tidak akan efisien dan efektif.

#### **3.1.3.1 Jumlah Personil**

Pada indikator ini, penerapan kebijakan menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan sesuai harapan atau tidak. Jumlah personil yang dimaksud dalam indikator ini adalah unsur pelaksana yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Jika terdapat unsur pelaksana yang tidak sesuai, maka proses penerapan kebijakan dapat terhambat. Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen masih belum mencukupi untuk melaksanakan tugas dengan optimal. Akibatnya, beberapa pegawai tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) mereka masing-masing dengan baik, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan.

### **3.1.3.2 Kekuatan Personel**

Kualitas personel dalam pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dengan baik dan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa sebagian besar pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki kualitas, keterampilan, dan pengalaman yang memenuhi standar. Namun, terdapat beberapa pegawai senior yang mengalami kesulitan dalam menguasai teknologi terbaru. Kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan teknologi bagi pegawai senior tersebut untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih optimal.

### **3.1.4. Sumber Daya**

Sumber daya juga merupakan salah satu aspek kunci dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, seringkali kita menghadapi kendala. Salah satu kendala utama yang mungkin timbul adalah sumber daya yang kurang memadai, yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Sumber daya ini meliputi semua bentuk dukungan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, termasuk alokasi atau peruntukan sumber daya serta keakuratan penggunaannya.

#### **3.1.4.1 Alokasi Peruntukan**

Indikator alokasi peruntukan membahas tentang penentuan dan pengalokasian sarana dan prasarana dalam proses implementasi kebijakan program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting. Sarana dan prasarana ini sangat penting karena menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kondisi Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai. Namun, kendala yang dihadapi saat ini oleh para pegawai adalah mobilitas dan akses menuju wilayah perkampungan yang masih sulit dijangkau. Tantangan ini menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas guna memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh wilayah.

#### **3.1.4.2 Ketepatan Penggunaan**

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan prosesnya. Memastikan penggunaan optimal sumber daya ini sesuai fungsinya adalah kunci untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut penelitian, penting bagi program bapak asuh anak stunting untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal, memastikan aksesibilitas, kualitas, dan kelangsungan sarana serta prasarana yang diberikan. Ini mencakup mengidentifikasi kebutuhan khusus anak-anak stunting, menyediakan layanan yang mudah dijangkau, dan memastikan standar kualitas tinggi dalam setiap aspek program. Dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang besar dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

## **3.3 Diskusi Utama Penelitian**



Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan penanggulangan stunting, terdapat beberapa perbandingan yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian implementasi program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Pertama, dari segi kualitas tenaga kesehatan dan sumber daya manusia, penelitian oleh Febiayu Rahmanda dan Fitriani Pramita Gurning menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM di Puskesmas Pagar Jati untuk mengatasi beban kerja yang ada, sementara di Kabupaten Murung Raya, sumber daya manusia masih belum mencukupi untuk mendukung program secara optimal.

Kedua, terkait tingkat sosialisasi dan penerimaan masyarakat, penelitian Erina Fahzira menemukan bahwa sosialisasi terhadap program penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum maksimal, serupa dengan tantangan yang mungkin dihadapi di Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Ketiga, dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana, seperti yang diamati di Kabupaten Murung Raya, masih ada desa yang belum memiliki posyandu atau posyandu yang belum memadai sarana. Hal ini dapat menjadi perbandingan dengan kondisi infrastruktur dan ketersediaan posyandu di Kabupaten Kepulauan Yapen. Keempat, dari segi efektivitas program dan dampak langsung, penelitian Sahroji, Hidayat, & Nababan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kabupaten Karawang belum optimal dan belum memberikan dampak langsung yang signifikan kepada masyarakat. Evaluasi ini dapat menjadi panduan untuk menilai sejauh mana program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen telah berhasil mencapai tujuan penurunan stunting.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, penelitian tentang implementasi program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang telah berhasil diimplementasikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya serta menyoroti area-area yang masih memerlukan perbaikan. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan penurunan stunting dengan lebih baik di wilayah tersebut.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Diskusi tentang temuan utama penelitian implementasi program bapak bunda asuh anak stunting dalam penanganan stunting di kabupaten kepulauan yapen provinsi papua menyoroti hambatan utama dalam program bapak bunda anak asuh stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang program ini, terutama di daerah pedalaman yang jauh dari pusat informasi. Jarak geografis yang besar dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menyebabkan akses terbatas terhadap informasi mengenai program tersebut. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, masih terlihat bahwa sebagian besar dari mereka belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai program ini, meskipun program tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak serta keluarga di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan penyebaran informasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mengambil manfaat dari program ini secara optimal.

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi program bapak bunda asuh anak stunting dalam penanganan stunting di kabupaten kepulauan yapen provinsi papua, belum berjalan dengan optimal dikarenakan adanya Yapen menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan akses, konsistensi aturan,

ketidacukupan personil, dan sumber daya yang terbatas, namun upaya kolaboratif dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah tersebut. Hambatan dalam implementasi program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai program bapak bunda anak asuh stunting, menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya program tersebut dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak serta keluarga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Guna meningkatkan pelaksanaan program maka disarankan untuk meningkatkan efektivitas program Bapak Bunda Anak Asuh Stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, diperlukan peningkatan strategi sosialisasi melalui media yang beragam, penguatan kerjasama lintas sektor, dan inovasi dalam pendekatan untuk mencapai wilayah terpencil, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta kesuksesan program tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas oleh keterbatasan dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup distrik-distrik tertentu yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, sehingga terbatas secara geografis dan temporal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan di masa mendatang akan dilakukan studi lanjutan yang menggali lebih dalam tentang program ini dengan fokus pada distrik-distrik lain yang dapat menjadi objek penelitian.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan semua pihak terkait atas dedikasi dan kerja keras dalam mengimplementasikan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting untuk penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadi dasar keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Eko Putro Sandjojo 2017. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting: Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi
- Creswell, J. W. (2013). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy : Fifteenth Edition*. Pearson.
- FAHZIRA, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta
- Hermawan, I. (2019). *Metedologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methode)*. HidayatulQuran.



Muri Yusuf. 2014. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. Jakarta : prenadamedia group.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting

Purba, S. H. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Rahmanda, F., & Gurning, F. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pagar Jati. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 18-27.

Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1).

Sari, R. I. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Dalam Penurunan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Datar Kotou Kabupaten Murung Raya (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Sugiyono, Masrun. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D Bandung: Alfabeta,” 2012

Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Kasus. *Yogyakarta: CAPS, 20110*.

